



**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO**

*Implementation Of The National Program Of Urban Self Empowerment
(PNPM Mandiri Perkotaan) In District Of Bondowoso, Bondowoso Regency*

TESIS

Oleh :

**YETI TIMORISASI
NIM. 060920101029**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO**

*Implementation Of The National Program Of Urban Self Empowerment
(PNPM Mandiri Perkotaan) In District Of Bondowoso, Bondowoso Regency*

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh :

**YETI TIMORISASI
NIM. 060920101029**

Pembimbing Tesis:

**Prof. Dr. A. KHUSYAIRI, MA.
Prof. Dr. HARY YUSWADI, MA.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
KONSENTRASI ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

Persembahan :

Dengan Segala Rasa Syukur Kehadirat Allah

SWT, Karya Ini Kupersembahkan Untuk :

Mama Dan Papa Tercinta Yang Dalam Setiap

Tarikan Nafas Senantiasa Mendoakan,

Mendukung Serta Menanti Keberhasilanku

Anakku Tersayang M. Nashwan Natasian Yang

Selalu Menjadi Pemicu Semangatku

Serta Almamaterku Tercinta

Unej

Motto:

Bersabarlah Kamu, Kuatkan Kesabaranmu dan

Tetaplah Bersiap Siaga dan Bertawakalah Kepada Allah,

Supaya Kamu Beruntung

(Qs. Ali Imron : 200)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YETI TIMORISASI
NIM : 060920101029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul : *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juli 2011
Yang menyatakan,

YETI TIMORISASI
NIM: 060920101029

PEMBIMBING

TESIS

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN
BONDOWOSO**

*Implementation Of The National Program Of Urban Self Empowerment
(PNPM Mandiri Perkotaan) In District Of Bondowoso, Bondowoso Regency*

Oleh :

**YETI TIMORISASI, SSTP
NIM. 060920101029**

Pembimbing Tesis:

**Prof. Dr. A. KHUSYAIRI, MA.
Prof. Dr. HARY YUSWADI, MA.**

PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui
Tanggal 22 Juli 2011

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. A. KHUSYAIRI, MA.

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. HARY YUSWADI, MA.
NIP. NIP. 19520727 198103 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Prof. Dr. KABUL SANTOSO, M.Si
NIP. 19430714 197008 1 001

PENGESAHAN

Tesis berjudul (dalam Bahasa Indonesia) : "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso", (dalam Bahasa Inggris) : "*Implementation Of The National Program Of Urban Self Empowerment (PNPM Mandiri Perkotaan) In District Of Bondowoso, Bondowoso Regency*" telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Juni 2011
Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :
Ketua,

Prof. Dr. A. KHUSYAIRI, MA.

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. HARY YUSWADI, MA.

NIP. 19520727 198103 1 003

Dr. SASONGKO, M.Si

NIP. 19570407 198609 1 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Prof. Dr. KABUL SANTOSO, M.Si

NIP. 19430714 197008 1 001

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Prof. Dr. HARY YUSWADI, MA.

NIP. 19520727 198103 1 003

ABSTRAK

Oleh : Yeti Timorisasi

Pembimbing Utama: Prof. Dr. Khusayiri, M.A

Pembimbing Anggota : Prof. Dr. Harry Yuswadi

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan sehingga mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan. Akibatnya program-program tersebut belum efektif mampu mengurangi angka kemiskinan dan tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program penanggulangan kemiskinan.

Kabupaten Bondowoso sebagai bagian dari propinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) daerah tertinggal dan dikategorikan memiliki penduduk miskin terbanyak sehingga program pengentasan kemiskinan juga telah bergulir pada masyarakat Bondowoso untuk daerah perkotaan program yang ada yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Namun dari 5 (lima) Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada pada tahun 2003 hanya 1 (satu) Badan Keswadayaan Masyarakat yang mampu berkembang, 4 (empat) lainnya dinyatakan kolaps. Untuk mendapatkan dana PNPM Mandiri Perkotaan, pada pertengahan tahun 2006 dilaksanakan review Badan Keswadayaan Masyarakat sehingga pada tahun 2007 Badan Keswadayaan Masyarakat yang mendapatkan alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 5 (lima) Badan Keswadayaan Masyarakat. Pada pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat tahun 2008 terjadi kesimpang siuran berita dan perubahan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan dan iri dari Badan Keswadayaan Masyarakat yang lain.

Permasalahan lain yang dihadapi Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sampai saat ini adalah keterlambatan waktu pelaksanaan dan pencairan dana terminnya. Hal ini menyebabkan jadwal yang ada tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan. Selain itu kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan menyebabkan hasil PNPM Mandiri Perkotaan tidak bertahan lama dan belum adanya pihak yang mau bermitra dengan Badan Keswadayaan Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tidak melakukan pengujian hipotesis, dan hanya mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Meskipun demikian data kualitatif yang diperoleh dari dokumen resmi juga digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Informan penelitian adalah PPK PNPM Mandiri Perkotaan, Kepala Kecamatan Bondowoso, Kepala Desa/Kelurahan lokasi PNPM MP, Ketua RT

Penerima manfaat program PNPM MP, Ketua LKM, Faskel, secara acak masyarakat yang menerima manfaat serta masyarakat sekitar penerima manfaat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP) di Kabupaten Bondowoso maka dibentuk Tim Pengarah Kabupaten yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 600/741/430.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Tim Pengarah Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP). Dalam melaksanakan tugasnya anggota Tim Pengarah Kabupaten di bantu oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP. Dalam hal pengawasan selain telah ada pengawasan melekat dari pendamping/fasilitator juga ada pembina teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Pelaksanaan PNPM MP terbagi menjadi 4 tahap yaitu tahap persiapan masyarakat, tahap perencanaan, tahap pencairan dan tahap pelaksanaan kegiatan.

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan kualifikasi kurang baik. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan model Edward III, diketahui: 1). faktor komunikasi yang meliputi; transmisi, kejelasan dan konsistensi, yang berasumsi bahwa faktor komunikasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tergolong baik di tingkat pelaksana namun kurang di tingkat masyarakat di sekitar lokasi penerima dana PNPM Mandiri Perkotaan. 2). faktor sumber-sumber yang meliputi: sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas, secara umum tergolong kurang baik. Hanya jumlah dana yang mendukung implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. 3). faktor disposisi atau kecenderungan kurang baik walaupun ada komitmen dan kerelaan dari agen pelaksana untuk melaksanakan program namun masih ada motif pribadi atau politik dan belum ada kesepahaman yang utuh dengan masyarakat penerima manfaat. Kecenderungan dan sikap agen pelaksana dan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga dengan mengetahui dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat motif dan kepentingan pribadi agen pelaksana dapat ditekan seminimal mungkin dan fragmentasi dapat dihindarkan. Pada instansi yang menjadi anggota tim pengarah variabel disposisi dapat dilihat dari keseriusan mereka dalam memberikan dukungan pada kelancaran dan pengendalian pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. 4) faktor Struktur Birokrasi berupa Standard Operating Procedures (SOP) cukup baik karena didukung oleh sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi PNPM MP antara lain adanya Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 600/741/430.42/2009 tentang Tim Pengarah Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP). Akan tetapi fragmentasi kebijakan terjadi karena kurang adanya kesepahaman antara pelaksana kebijakan dengan kepala wilayah sehingga kualifikasinya kurang baik

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan

ABSTRACT

By: Yeti Timorisasi

Supervisor: Prof. Dr. Khusayiri, M.A

Co-Supervisor: Prof. Dr. Harry Yuswadi

The orientation of the existing various poverty management programs are only focused on one of dimensions of symptoms of poverty, so they reflect the approach to programs that are partial, sectoral, charitable and do not touch the root causes of poverty. As a result, the programs have not been able to effectively reduce poverty rate and are unable to grow community independence that ultimately will not be able to realize the sustainability aspect of poverty management programs.

Bondowoso as a part of East Java province is one of the 8 (eight) regions which are left-behind and categorized to have the highest number of poor populations, so that the available poverty alleviation programs have also been rolling for Bondowoso citizens to urban areas, namely National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban. However, of the 5 (five) Community Self-Supporting Agency that existed in 2003, there was only 1 (one) Community Self-Supporting Agency that could develop while the other 4 (four) agencies were declared collapse. In purpose of gaining the funds of PNPM Urban Independence, in mid-2006 a review of Community Independence Agency was held, so in 2007, the number of agencies that obtained funding allocation of PNPM Urban Independence was 5 (five). In the settlement of the funds for Community Assistance in 2008 there was overlap of information and changes in the allocation of the funds so this caused suspicion and envy from the other community independence agencies.

Another issue faced by the community independence agencies that exist in District Bondowoso, Bondowoso Regency until now is the time delay in the implementation and settlement of term funds. This causes the existing schedule not in line with the time of execution. In addition, the lack of community trust and awareness on the activities of PNPM Urban Independence causes the result of PNPM Urban Independence to last not long and the absence of parties who want to be in partnership with the Community Independence Agency.

This research was intended to answer the question: How is implementation of the National Program of Urban Self Empowerment (PNPM MP) in District of Bondowoso, Bondowoso Regency. This research used a qualitative approach, did not test hypotheses, and only described the qualitative data obtained from observations and interviews. Nevertheless, the qualitative data obtained from official documents were also used to strengthen the research findings. The research informants were District Supervisory Committee of PNPM Urban Independence, Chief of District of Bondowoso, Head of Village/Sub-District of PNPM MP, Chairman of Neighbourhood Group obtaining the advantage of PNPM MP Program, chairman of the Community Independence Agency, sub-district facilitator, in random people who received the benefit as well as the surrounding community obtaining the advantage of the program.

Based on the research results it was found that for the smoothness and good administration of the implementation of PNPM Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP) in Bondowoso Regency, the Regency Steering Team was formed as stipulated in Decree of the Head of Bondowoso Regency Number: 600/741/430.42/2009 dated June 30, 2009 on the Steering Team of District for National Program for Community Empowerment of Urban Independence (*PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP*). In performing their duties, the members of District Steering Team were assisted by the Operational Activities Officer of P2KP PNPM Mandiri. In terms of supervision, in addition to existing oversight of the supervisor/facilitator, there were also technical advisers of the Department of Bina Marga and Cipta Karya. The implementation of PNPM of Urban Independence was divided into four phases, namely the preparatory stage, the planning stage, the settlement stage and the activities implementation stage.

The Implementation of The National Community Empowerment Program of Urban Independence (PNPM MP) in District of Bondowoso, Bondowoso Regency were classified as less good. Based on the analysis using Edward III model, it was known: 1). communication factor that included: transmission, clarity and consistency, which assumed that the implementation of the communication factor of PNPM Urban Independence was classified as good at the executing stage but poor at the community level in the vicinity of PNPM Urban grantees. 2). Factor of sources that included: human resources, information, authority and facilities, generally were classified as less good. Only the amount of fund supported the implementation of PNPM of Urban Independence in District of Bondowoso, Bondowoso Regency. 3). Factors of unfavorable disposition or bad tendency, although there was a commitment and willingness of the executing agents of to implement the program, but there was still a personal or political motive, and there was no total agreement with the grantee communities. Trends and attitudes of executing agents and communities were affected by social and cultural conditions, so that by recognizing and understanding the social and cultural conditions of the community, the personal interest and motives of the executing agents can be reduced to a minimum level and fragmentation can be avoided. At institutions that became the members of the steering team, disposition variable can be seen from their seriousness in providing support to smoothness and control of the implementation of PNPM Urban Independence in their working area. 4) Factor of Bureaucratic Structure of the Standard Operating Procedures (SOP) was good enough because it was supported by the necessary resources in the implementation of the PNPM MP, among others, the decree of the Head of Bondowoso Regency No. 600/741/430.42/2009 on District Steering Team of the National Program for Community Empowerment (*PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP*). However, the policy fragmentation occurred because of lack of understanding among policy implementers with the regional head, so that the qualifications were less good.

Keywords: Policy Implementation, Community Empowerment, PNPM Urban Independence

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat ramat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini untuk memperoleh Gelar Sains pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. terselesainya tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO” ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik yang berupa bimbingan, arahan maupun petunjuk.

Dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya pada yang terhormat dan tercinta Mama, Papa, Irwan Dwi Santoso, suamiku Achmad M. Natasian, anakku M. Nashwan Natasian serta seluruh keluarga besar atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Peneliti juga menyampaikan rasa terima dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. A. Khusyairi, MA (Pembimbing Utama) dan Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA (Pembimbing Anggota) atas segala bimbingan, arahan, petunjuk serta waktu yang diberikan dalam penyusunan tesis ini. Baik dari segi materi maupun teknis penyusunan tesis ini.
2. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan segenap perhatian dan ilmu selama peneliti mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Ilmu

Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

3. Drs. Muhlis, Drs. Harry Patriotono, Ketua LKM se Kec. Bondowoso, PJOK
PNPM MP Bpk. Agus Suripno, serta seluruh anggota LKM dan warga Kel.
Blindungan, Kotakulon, Dabasah, Badean, Kembang, Sukowiryo dan Pejaten
serta Kepala Kelurahan se Kecamatan Bondowoso yang telah banyak
membantu dalam penelitian tesis ini.
4. Teman-teman yang telah membantu terselesaikannya tesis ini mbak Nurul,
mbak Vero, Haris, Pak Pra Adi. Semoga amal baik yang telah diberikan pada
peneliti mendapat balasan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih dari sempurna, oleh
karena peneliti mengharapkan masukan serta kritik yang membangun demi lebih
baiknya laporan penelitian sejenis.

Bondowoso, 22 Juli 2011

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPANii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
PEMBIMBING	vi
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
SINGKATAN DAN ISTILAH	xx
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Aspek Teoritik	7
1.4.1 Aspek Praktis	7
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kemiskinan	13
2.3 Pemberdayaan	18
2.4 PNPM MP	20
2.5 Konsep Kebijakan Publik	30
2.6 Konsep Implementasi	37

2.7	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi	40
2.7.1	Faktor Komunikasi	41
2.7.2	Faktor Sumber sumber	43
2.7.3	Faktor Disposisi	47
2.7.4	Faktor Struktur Birokrasi	50

BAB III Metode Penelitian

3.1	Lokasi dan Fokus Penelitian	54
3.2	Desain Penelitian	55
3.3	Penentuan Informan Penelitian	60
3.4	Pengumpulan Data	61
3.4.1	Pengamatan	63
3.4.2	Wawancara	63
3.5	Teknik Analisa Data	64
3.6	Keabsahan Data	68
3.6.1	Derajat Kepercayaan	68
3.6.2	Keteralihan	70
3.6.3	Kebergantungan dan Kepastian	70

BAB IV Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Bondowoso

Kabupaten Bondowoso

4.1	Gambaran Umum Kecamatan Bondowoso	72
4.1.1	Keadaan Geografi	72
4.1.2	Keadaan Demografi	73
4.1.3	Kondisi Perekonomian	75
4.2	Implementasi PNPM MP	78
4.3	Faktor yang mempengaruhi implentasi PNPM MP	89
4.3.1	Faktor Komunikasi	90
4.3.2	Faktor Sumber-sumber	98
4.3.3	Faktor Disposisi	105
4.3.4	Faktor Struktur Birokrasi	106

4.4 Model Efektifitas implementasi PNPM MP	109
--	-----

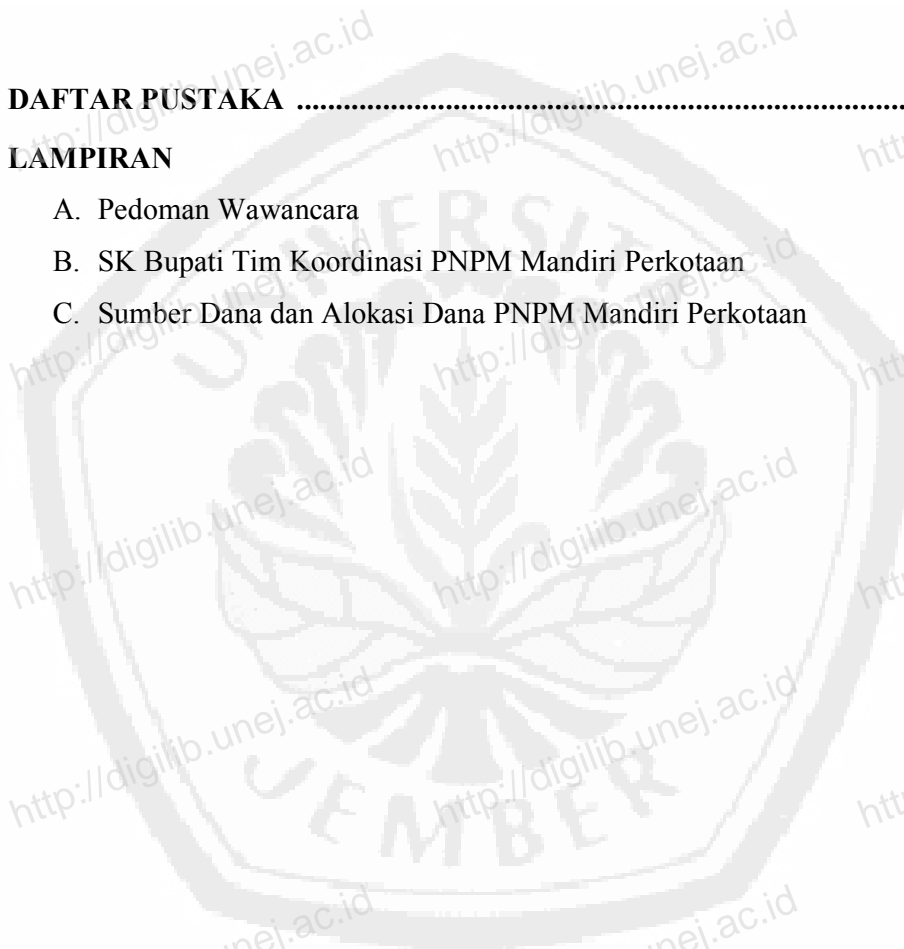
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	123
5.2 Implikasi Teoritis	125
5.3 Implikasi Praktis	127
5.4 Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	xxii
-----------------------------	-------------

LAMPIRAN

- A. Pedoman Wawancara
- B. SK Bupati Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan
- C. Sumber Dana dan Alokasi Dana PNPM Mandiri Perkotaan



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Luas dan jenis peruntukan tanah	65
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	66
Tabel 4.3 Jumlah rumah tangga miskin	69
Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan	69
Tabel 4.5 Kenggotaan Tim Pengarah	74



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Gap Komunikasi Kebijakan PNPM MP	84
Bagan 2 faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM MP.....	93
Bagan 3 Prosedur Implementasi PNPM MP	96
Bagan 4 Model Efektifitas Implementasi PNPM MP	109



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BOP	: Biaya Operasional
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Fasilitator	: Tenaga Pengembangan Masyarakat P2KP
FGD	: Focused Group Discussion / Diskusi Kelompok terarah
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
LKM	: Lembaga Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik yang dahulu dinamakan BKM
MDGs	: Millennium Development Goals
P2KP	: Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PJOK	: Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
PK	: Pembuat Komitment
Pej.PK	: Pejabat Pembuat Komitment
PNPMMP	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
PPK	: Program Pengembangan Kecamatan
PPM	: Penanganan Pengaduan Masyarakat
PU	: Pekerjaan Umum
Relawan	: Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya tanpa pamrih
RK	: Refleksi Kemiskinan
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan
RKM	: Rembug Kesiapan Masyarakat
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RT/RW	: Rukun Tetangga/Rukun Warga

SATKER-P2KP	: Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
SOP	: Standard Operational Procedures
Tim Interdept	: Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Antar Departemen Terkait di Tingkat Nasional
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TKPP	: Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (tingkat Propinsi dan Kota/ Kabupaten)
UKL	: Unit Kelola Lingkungan
UP	: Unit Pengelola yang dibentuk BKM
UPK	: Unit Pengelola Keuangan
UPL	: Unit Pengelola Lingkungan
UPS	: Unit Pengelola Sosial
WB	: World Bank



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

AG, Subarsono, 2005, **Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Barthos, Basir, 2010, **Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu pendekatan Makro**, Bumi Aksara, Jakarta.

Hamidi, 1995, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang.

Indonesia Center for Sustainable Development, 2005, **Politik Kemiskinan**, ICSD, Jakarta.

Islamy, Irfan, 1984, **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara**, Bina Aksara, Jakarta.

Jamasy, Owin, 2004, **Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan**, Belantika, Jakarta.

Moleong, Lexy J, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Nugroho, Riant, 2002, **Analisis Kebijakan**, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Parsons, wayne, 2005, **Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan**, Prenada Media, Jakarta.

Prawirokusumo, Soeharto, 2001, **Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)**, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta

Siagian, SP, 2000, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Bumi Aksara, Jakarta.

Suharto, Edi, 2005, **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**, Refika Aditama, Bandung.

Usmara, A, 2002, **Paradigma Baru Sumber Daya Manusia**, Amara Books, Yogyakarta

Wibawa, Samudra, 1994, **Evaluasi Kebijakan Publik**, Jakarta Raja.

Wibawa, Samudra, 2000, **William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Winarno, Budi, 2002, **Teori Dan Proses Kebijakan Publik**, Media Presindo, Jakarta.

B. Undang-undang/Peraturan-peraturan/Journal/Modul/Koran/Majalah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 **tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 **tentang Keuangan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 **tentang Perbendaharaan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 **tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 **tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 **tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.**

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 **tentang Kelurahan.**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 **tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.**

Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 **tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.**

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 **tentang Hibah Kepada Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).

Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 **tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 **tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597).

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 **tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.**

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 **tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 **tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah.**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 **tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Bondowoso Dalam Angka Tahun 2008

C. Sumber lain.

Pudji Harjoto, 2004. **Implementasi Program Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Studi Kasus di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.** Tesis ini tidak dipublikasikan: Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Jember, Jember.

Niken Setyaningsih, 2007. **Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus Di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Semarang Tahun 2003 – 2005).** Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Andi Irmayanti Azis, 2008. **Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).** MAPD IPDN, Sumedang.

PEDOMAN WAWANCARA

I. PPK dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan

1. Bagaimana kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan ?
2. Apakah ada permasalahan/pengaduan tentang kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan ?
3. Apakah ada forum penyelesaian pengaduan masyarakat
4. Sanksi apa yang diberikan kepada LKM yang dana simpan pinjamnya ada tunggakan besar ?
5. Dasar dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Bondowoso ?
6. Apakah pelaksanaan pencairan dan kegiatan selalu tepat waktu sesuai rencana pelaksanaan kegiatan dalam PJM Pronakis ?
7. kendala apa saja yang ditemui LKM dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ?

II. Fasilitator Kelurahan dan Kabupaten

1. Secara umum menurut anda apakah informasi PNPM Mandiri Perkotaan dapat dimengerti ?
2. Apakah menurut anda kebijakan PNPM dapat diterima masyarakat ?
3. Apakah dalam proses pembuatan RAB terutama desain gambar untuk kegiatan lingkungan menemui kendala ?
4. Bagaimana antusiasme warga pada saat pelaksanaan kegiatan ?
5. Untuk kegiatan lingkungan apakah telah memperhatikan safe guard dan larangan kegiatan ?

III. LKM

1. Secara umum apakah informasi PNPM Mandiri Perkotaan adapat dimengerti dengan jelas ?
2. Apa saja kendala yang ada di masyarakat ?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap program ?

4. Apakah kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan ?
5. Apakah ada anggota LKM yang tidak aktif/rangkap jabatan ?
6. Bagaimana perkembangan simpan pinjam ?
7. Apakah ada sanksi bagi penunggak ?
8. Apakah ada sanksi lokal di tingkat RT untuk mengantisipasi tunggakan ?
9. Apakah ada masyarakat yang ingin bermitra dengan LKM ?
10. Apa saja prasarat untuk mendapatkan alokasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ?

IV. KSM

1. Apakah setiap informasi yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perkotaan selalu diterima oleh KSM ?
2. Apakah ada papan informasi PNPM Mandiri Perkotaan di setiap KSM ?
3. Bagaimana cara warga untuk mengetahui informasi kegiatan yang dilakukan KSM ?
4. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ?
5. Bagaimana respon dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ?

V. Masyarakat, Tokoh Masyarakat. Ketua RT/RW

1. Secara umum apakah informasi PNPM Mandiri Perkotaan dapat dimengerti dengan jelas ?
2. Apakah dalam perencanaan kegiatan selalu di libatkan oleh LKM ?
3. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui tentang progres kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat sosialisasi program dari LKM/KSM?
5. Siapa saja yang biasanya menyampaikan informasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan ?
6. Bagaimana dukungan terhadap kegiatan LKM ?

7. Apakah dalam setiap pelaksanaan kegiatan di wilayah bapak/ibu LKM/KSM selalu memberi informasi terlebih dahulu ?
8. Bagaimana hasil dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Bapak/Ibu ?
9. Apakah ada kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ?
10. Apakah LKM memberi sanksi apabila Bapak/Ibu menunggak dana kelompok simpan pinjamnya ?
11. Apakah ada tanggung renteng dalam pelaksanaan simpan pinjam ?
12. Apakah LKM/KSM memberi informasi kriteria penerima bantuan atau alokasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ?

